

Kajian Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pembiayaan Usaha Kecil : Studi Tentang Social Allocation of Capital di Indonesia

Fadlul Imansyah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20184924&lokasi=lokal>

Abstrak

Secara umum pemberian kredit program kredit perbankan yang sumber pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kepada usaha kecil melalui beberapa jenis skim kredit program memiliki dampak yang positif terhadap usaha kecil dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Namun di lain pihak, efek penciptaan uang (money creation) melalui subsidi bunga yang diberikan telah turut serta memberikan kontribusi terhadap kenaikan angka inflasi di Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut, maka diperlukan studi yang mengkaji berbagai mekanisme pembiayaan usaha kecil yang dilakukan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan terdapat alternatif pengembangan pembiayaan usaha kecil lain yang dapat meminimumkan dampak negatifnya bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur dan pengkajian data-data sekunder yang didapat dari institusi-institusi yang terkait. Kalau dilihat secara keseluruhan, maka apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini telah menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap upaya pengembangan usaha-usaha kecil dari sisi pembiayaan. Namun demikian akan lebih baik apabila upaya pengembangan tersebut diintegrasikan dengan beberapa penambahan fungsi PT PNM (Persero) sebagai salah satu BUMN yang ditunjuk sebagai koordinator penyaluran kredit program. Yaitu menempatkan PT PNM (Persero) pada sisi penawaran dan permintaan modal, sebagaimana yang dilakukan oleh SBA (Small Business Administration) Lembaga Pemerintah AS yang menangani usaha-usaha kecil. Pada sisi penawaran pasar modal, PT PNM (Persero) dapat bertindak sebagai lembaga pemerintah yang mengembangkan UKMK untuk menjadi salah satu emiten atau bertindak sebagai penjamin atas surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh UKMK. Sedangkan pada sisi permintaan, PT PNM (Persero) dapat bertindak sebagai lembaga pemerintah yang mengelola surat-surat berharga UKMK untuk ditawarkan kepada para investor dalam bentuk reksa dana.